BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

NOMOR: 13/PR.02/K.YO-01/08/2026

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025-2029

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

Menimbang :

1. bahwa berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029;

2. bahwa berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029;

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) dan 2 (dua), perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Tahun 2025-2029 di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.

Mengingat :

1. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; dan

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025-2029

KESATU : Mengesahkan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Perubahan sebagaimana dimaksud diktum kesatu sebagaimana tersebut dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :BANTUL
Pada Tanggal :11 Agustus 2026

BAWASLU KABUPATEN BANTUL
KETUA,

Didik Joko Nugroho, S.Ant, M.IP.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran I
Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Bantul
Nomor : 13/PR.02/K.YO-01/08/2026
Tanggal : 11 Agustus 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN
BAWASLU KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Keterangan Formulasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Jumlah laporan akhir pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/ Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024	1 Laporan	Laporan akhir pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/ Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024
		Jumlah Laporan pengawasan Pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Kabupaten/Kota	1 Laporan	Laporan Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan di Bawaslu Kabupaten
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses	1 Laporan	Laporan Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses
3	Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas	Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan produk hukum dan layanan hukum	1 Laporan	Laporan diseminasi produk hukum terkait kepemiluan
4	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Kualifikasi keterbukaan informasi public Kabupaten/Kota	Informatif	Hasil Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik oleh Komisi Informasi Daerah
5	Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Profesional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Modern	Nilai Kinerja Anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota	90	Hasil Nilai Kinerja Anggaran
6	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada Di	Persentase fasilitasi pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil	100 %	$= \frac{Jumlah\ Realiasi\ Capaian\ Output}{Jumlah\ Target\ Output\ pada\ Renja} x100\%$ Realisasi dan Target Output atas Rincian Output berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Keterangan Formulasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Bawaslu Kabupaten/Kota Dan Lembaga Pemilu Ad-Hoc	Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024		1. 5245.BIC.001 2. 5245.BIC.003
		Persentase fasilitasi pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Kabupaten/Kota	100 %	$= \frac{Jumlah\ Realiasi\ Capaian\ Output}{Jumlah\ Target\ Output\ pada\ Renja} x100\%$ Realisasi dan Target Output atas Rincian Output berikut: 1. 7014.QIC.002
		Persentase pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses	100 %	$= \frac{Jumlah\ Realiasi\ Kegiatan\ yang\ Terfasilitasi}{Jumlah\ Target\ Kegiatan} x100\%$
		Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Kabupaten/Kota, (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu	100 %	$= \frac{Jumlah\ Realiasi\ Capaian\ Output}{Jumlah\ Target\ Output\ pada\ Renja} x100\%$ Realisasi dan Target Output atas Rincian Output berikut: 1. 6849.EBA.956 2. 6849.EBA.994 3. 6849.EBD.955
		Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian (usul kenaikan pangkat, KGB, pensiun, administrasi jabatan fungsional serta administrasi kepegawaian lainnya) yang tepat waktu.	100 %	$= \frac{Jumlah\ Realiasi\ Capaian\ Output}{Jumlah\ Target\ Output\ pada\ Renja} x100\%$ Realisasi dan Target Output atas Rincian Output berikut: 1. 6850.EBA.962 2. 6850.EBC.954
		Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Kabupaten/Kota	100 %	$= \frac{Jumlah\ Realiasi\ Capaian\ Output}{Jumlah\ Target\ Output\ pada\ Renja} x100\%$ Realisasi dan Target Output atas Rincian Output berikut: 1. 4355.EBD.961 2. 4356.EBA.963 3. 6849.EBD.974
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota	90	Hasil Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran
		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota	90	Hasil Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran oleh Kementerian Keuangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran II
Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Bantul
Nomor : 13/PR.02/K.YO-01/08/2026
Tanggal : 11 Agustus 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN
BAWASLU KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026-2029

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				SATUAN	KETERANGAN FORMULASI
			2026	2027	2028	2029		
1.	Meningkatnya kualitas instrumen dan kegiatan pencegahan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Persentase penyusunan Instrumen pencegahan yang relevan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80	85	90	95	%	$= \frac{Jumlah\ Realiasi\ Kegiatan\ Pencegahan}{Jumlah\ Target\ Kegiatan\ Pencegahan} x100\%$
		Persentase kegiatan Pencegahan yang relevan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80	85	90	95	%	$= \frac{Jumlah\ Realiasi\ Kegiatan\ Pencegahan}{Jumlah\ Target\ Kegiatan\ Pencegahan} x100\%$
2.	Meningkatnya kualitas pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persentase kualitas Pengawasan data pemilih berkelanjutan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80	85	90	95	%	$= \frac{Jumlah\ Realiasi\ Kegiatan\ Pengawasan\ PDPB}{Jumlah\ Target\ Kegiatan\ Pengawasan\ PDPB} x100\%$
3.	Meningkatnya pelayanan penindakan pelanggaran Pemilu yang prima di Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan Penindakan pelanggaran Pemilu sesuai dengan Standar Operasional Prosedur di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	0	85	90	95	%	$= \frac{Jumlah\ Layanan\ Penindakan\ Pelanggaran\ sesuai\ SOP}{Jumlah\ Temuan\ dan\ Laporan\ Penindakan\ Pelanggaran} x100\%$

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				SATUAN	KETERANGAN FORMULASI
			2026	2027	2028	2029		
		Persentase Pelayanan penindakan Pelanggaran Pemilu pada Sentra Gakkumdu sesuai dengan Standar Operasional Prosedur di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	0	85	90	95	%	$= \frac{Jumlah\ Layanan\ Penindakan\ Pelanggaran\ Pidana\ Pemilu\ sesuai\ SOP}{Jumlah\ Temuan\ dan\ Laporan\ Penindakan\ Pelanggaran\ \ Pidana\ Pemilu} x100\%$
4.	Meningkatnya Pemahaman pengguna Layanan terhadap Penindakan pelanggaran Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan Pemahaman penerima Manfaat bidang penindakan Pelanggaran Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	5	7	10	15	%	$= \frac{Jumlah\ Peningkatan\ pemahaman\ penerima\ Manfaat\ Bidang\ Penindakan\ Pelanggaran\ Pemilu}{Jumlah\ Penerima\ manfaat\ Bidang\ Penindakan\ Pelanggaran\ Pemilu} x100\%$
5.	Meningkatnya pelayanan Penyelesaian sengketa proses Pemilu yang prima di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan Penerimaan permohonan, mediasi dan adjudikasi Sengketa proses Pemilu yang sesuai dengan Standar operasional prosedur di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	0	85	90	95	%	$= \frac{Jumlah\ Layanan\ Penerimaan\ Permohonan\ Mediasi, dan\ Adjudikasi\ yang\ sesuai\ SOP}{Jumlah\ Penerimaan\ Permohonan, Pelaksanaan\ Mediasi\ dan\ Pelaksanaan\ Adjudikasi} x100\%$
6.	Meningkatnya pemahaman Pengguna layanan Terhadap penyelesaian Sengketa proses Pemilu di Bawaslu	Persentase Peningkatan pemahaman pengguna layanan terhadap penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	5	7	10	15	%	$= \frac{Jumlah\ peningkatan\ pemahaman\ pengguna\ layanan\ terhadap\ penyelesaian\ sengketa\ proses\ Pemilu}{Jumlah\ pengguna\ layanan\ terhadap\ penyelesaian\ sengketa\ proses\ pemilu} x100\%$

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				SATUAN	KETERANGAN FORMULASI
			2026	2027	2028	2029		
	Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota							
7.	Meningkatnya Pemahaman peserta pemilu dalam sengketa proses Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persentase pemahaman pemahaman peserta pemilu dalam sengketa proses Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	5	7	10	15	%	$= \frac{Nilai\ Post\ Test - Nilai\ Pre\ Test}{Nilai\ Pre\ Test} x100\%$
8.	Meningkatnya partisipasi Kelompok masyarakat sipil dalam Pengawasan Pemilu partisipatif yang berkualitas di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah kader pengawas yang diberikan pendidikan dan pelatihan pengawasan Pemilu partisipatif di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	35	40	45	50	orang	Jumlah peserta Pendidikan pengawasan partisipatif pada Bawaslu Kabupaten/Kota
9.	Meningkatnya Kesadaran kelompok masyarakat sipil menjadi pemantau Pemilu terakreditasi di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan Kelompok masyarakat sipil yang menjadi Pemantau Pemilu terakreditasi di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80	82	85	90	%	Jumlah Peserta Kelompok Masyarakat Sipil yang menjadi Pemantau Pemilu terakreditasi di Bawaslu Kabupaten/Kota
10.	Meningkatnya kompetensi pegawai yang profesional, Kinerja pegawai, dan Kualitas layanan SDM Aparatur di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan	Persentase ASN Menduduki jabatan sesuai kompetensi di Bawaslu	80	85	90	95	%	$= \frac{Jumlah\ ASN\ yang\ menduduki\ jabatan\ sesuai\ kompetensi}{Jumlah\ ASN} x100\%$
		Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan bersertifikasi	80	85	90	95	%	$= \frac{Jumlah\ ASN\ yang\ mengikuti\ diklat\ sesuai\ jabatan}{Jumlah\ ASN} x100\%$

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				SATUAN	KETERANGAN FORMULASI
			2026	2027	2028	2029		
	Bawaslu Kabupaten/Kota	sesuai dengan jabatan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota						
		Persentase Penilaian Kinerja pegawai yang objektif, transparan, dan terukur di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80	85	90	95	%	$= \frac{Jumlah\ Dokumentasi\ Evaluasi\ SKP}{Jumlah\ ASN} x100\%$
		Persentase Pengelolaan administrasi kepegawaian (usul kenaikan pangkat, KGB, pensiun, Administrasi jabatan Fungsional serta administrasi Kepegawaian lainnya) yang tepat waktu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80	85	90	95	%	$= \frac{Jumlah\ Usul\ Kenaikan\ Pangkat,\ dan\ JAJF\ yang\ tepat\ waktu}{Jumlah\ Usul\ Kenaikan\ Pangkat\ dan\ JAJF} x100\%$ $= \frac{Jumlah\ Usulan\ KGB\ yang\ disetujui}{Jumlah\ Usulan\ KGB} x100\%$
11.	Meningkatnya evaluasi dan rekomendasi terhadap regulasi Bawaslu oleh Bawaslu Provinsi, dan Kabupaten/Kota	Persentase evaluasi dan rekomendasi terhadap regulasi Bawaslu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80	85	90	95	%	$= \frac{Jumlah\ dokumen\ evaluasi\ atau\ rekomendasi\ terhadap\ regulasi\ Bawaslu}{Jumlah\ regulasi\ Bawaslu\ yang\ diminta\ untuk\ di\ Evaluasi\ atau\ direkomendasi} x100\%$
12	Meningkatkan kualitas Pengelolaan Layanan Keuangan dan BMN yang handal di Bawaslu, Bawaslu	Persentase penyelesaian Pengelolaan Perbendaharaan, Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran, Akuntansi dan Pelaporan	80	85	90	95	%	$= \frac{Jumlah\ Realisasi\ Dokumen\ Pengelolaan\ Keuangan}{Jumlah\ Target\ Dokumen\ Pengelolaan\ Keuangan} x100\%$

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				SATUAN	KETERANGAN FORMULASI
			2026	2027	2028	2029		
	Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Keuangan, Pengelolaan Keuangan di Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota						
		Persentase penyelesaian pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	100	100	100	100	%	$= \frac{Jumlah\ Bulan\ Pembayaran\ Gaji\ dan\ Tunjangan\ yang\ tepat\ waktu}{Jumlah\ Pembayaran\ Gaji\ dan\ Tunjangan\ selama\ 1\ tahun} x100\%$ $= \frac{Jumlah\ Pegawai\ yang\ dibayarkan\ Gaji\ dan\ Tunjangan}{Jumlah\ Pegawai\ yang\ Berhak\ Menerima\ Gaji\ dan\ Tunjangan} x100\%$
		Persentase tersusunnya RKBMN dan Inventarisasi Aset dalam pengadaan dan pemeliharaan BMN di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	100	100	100	100	%	$= \frac{Dokumen\ usulan\ RKBMN\ yang\ terinput\ pada\ SIMAN}{Dokumen\ usulan\ RKBMN} x100\%$ $= \frac{Jumlah\ Data\ Barang\ Ruangan\ (DBR)\ yang\ dilakukan\ updating}{Jumlah\ Data\ Barang\ Ruangan\ (DBR)} x100\%$
13.	Meningkatnya pemanfaatan sistem pengadaan dan kualifikasi dan kompetensi SDM Pengelola barang dan jasa di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Persentase pengadaan barang dan jasa yang berbasis e-katalog di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80	85	90	95	%	$= \frac{Jumlah\ pengadaan\ berbasis\ e-katalog}{Jumlah\ Pengadaan\ melalui\ penyedia\ yang\ diumumkan\ di\ SIRUP} x100\%$
		Persentase SDM Pengelola barang dan jasa yang tersertifikasi barang/jasa di Bawaslu	80	85	90	95	%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				SATUAN	KETERANGAN FORMULASI
			2026	2027	2028	2029		
		Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota						$= \frac{Jumlah\ Pengelola\ Barang\ atau\ Jasa\ yang\ memiliki\ sertifikat}{Jumlah\ Pegawai\ yang\ mengelola\ barang\ atau\ jasa} x100\%$
14.	Meningkatkan Sinkronisasi perencanaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Penyelesaian tindak lanjut hasil Evaluasi SAKIP, dan Meningkatnya digitalisasi arsip di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang tersinkronisasi	100	100	100	100	%	$= \frac{Jumlah\ realisasi\ output\ dokumen\ perencanaan, keuangan, pemantauan\ dan\ pelaporan}{Jumlah\ dokumen\ perencanaan, keuangan, pemantauan\ dan\ pelaporan\ pada\ Renja} x100\%$
		Persentase tindak lanjut evaluasi SAKIP di Bawaslu	65	70	75	80	%	$= \frac{Jumlah\ catatan\ hasil\ evaluasi\ yang\ ditindaklanjuti}{Jumlah\ catatan\ hasil\ evaluasi} x100\%$
		Persentase penyelesaian Dokumen Perencanaan, Keuangan,Pemantauan dan Pelaporan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	100	100	100	100	%	$= \frac{Jumlah\ dokumen\ perencanaan\ yang\ telah\ disusun}{Total\ Dokumen\ yang\ harus\ dilengkapi} x100\%$
		Persentase pencapaian output pada level RO di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80	85	90	95	%	Nilai Capaian output
		Tingkat digitalisasi arsip di Bawaslu	90	92	94	95	%	Persentase arsip yang terdigitalisasi
15.	Terpenuhinya pengisian Indikator RB pada unit kerja Eselon II dan meningkatnya Unit Kerja yang memenuhi Kriteria	Persentase penyediaan data dukung pengisian Indikator RB di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80	85	90	95	%	$= \frac{Jumlah\ data\ dukung\ pengisian\ indikator\ RB}{Jumlah\ Dokumen\ RB\ berupa\ SK, LKE\ dan\ Laporan\ Bulanan} x100\%$

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				SATUAN	KETERANGAN FORMULASI
			2026	2027	2028	2029		
	WBK di Bawaslu dan penyediaan data dukung di Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Persentase unit kerja yang diusulkan dan memenuhi Kriteria penilaian WBK di Bawaslu	80	85	90	95	%	Persentase pengisian dokumen pendukung RB
16.	Meningkatnya keberhasilan KPI Pengawas Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian Laporan Pencapaian KPI Pengawas Pemilu yang tepat waktu dan memenuhi syarat ketentuan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	100	100	100	100	%	$= \frac{Jumlah\ Laporan\ yang\ tepat\ waktu\ dan\ memenuhi\ syarat}{Jumlah\ Laporan\ KPI\ Pengawas\ Pemilu} x100\%$
17.	Meningkatnya layanan Pusdatin terhadap unit kerja lainnya di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Persentase layanan data dan informasi yang diberikan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80	85	90	95	%	$= \frac{Jumlah\ Layanan\ data\ dan\ Informasi\ yang\ diberikan}{Jumlah\ Permintaan\ layanan\ data\ dan\ informasi} x100\%$
18.	Meningkatkan layanan peliputan, pendokumentasian, dan pemberitaan kegiatan kepemiluan serta penataan dan pengelolaan kehumasan, website, dan media massa yang transparan dan akuntabel di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Persentase layanan peliputan, pendokumentasian, dan Pemberitaan kegiatan kepemiluan yang transparan dan akuntabel di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80	85	90	95	%	$= \frac{Jumlah\ kegiatan\ yang\ dilakukan\ peliputan\ pendokumentasian\ dan\ pemberitaan}{Jumlah\ Kegiatan} x100\%$
		Persentase penataan dan pengelolaan kehumasan, website, dan media massa di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80	85	90	95	%	$= \frac{Jumlah\ Penataan\ dan\ Pengelolaan\ Kehumasan,\ Website\ dan\ Media\ Massa}{Jumlah\ Target\ Penataan\ dan\ Pengelolaan\ Kehumasan, Website\ dan\ Media\ Massa} x100\%$

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).